

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Singkat PT. PLN (Persero) Rayon Ahmad Yani

Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak dibidang pabrik gula dan pabrik the mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri.

Antara tahun 1942-1945 terjadi peliharaan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang diawal perang Dunia II. Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi diakhir perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerahkan kepada sekutu. kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buru h listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan pimpinan KNI Pusat berinisiatif.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi diakhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada sekutu. kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delagasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno, membentuk jawatan Listrik dan

Gas dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak dibidang listrik, gas, dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama 2(dua) perusahaan negara yaitu 6 Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyelesaikan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

PT. PLN (Persero) memiliki 58 wilayah kerja diseluruh Indonesia dan didalamnya terbagi atas kantor cabang, kantor unit (rayon), distrik, kantor pelayanan diseluruh Indonesia.

PT. PLN (Persero) Rayon Lambung Mangkurat dan Rayon A.Yani adalah satu unit di PT. PLN (Persero) yang bergerak dalam distribusi listrik

untuk masyarakat PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan negara sebagai sarana penyedia listrik yang diawasi dan dimonitori oleh aparat-aparat eksekutif maupun legeslatif Negara.

Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Area Banjarmasin Rayon Akhmad Yani.

Tempat Kedudukan : Cabang Banjarmasin

Nomor Telepon : 0511 (3354992, 3351158)

Jenis Usaha Perusahaan : Jasa Kelistrikan

Alamat : Jl. Akhmad Yani, Km. 4,5 Banjarmasin

Motto : “Litrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik”

Visi dan Misi Wilayah KALSELTENG

4. Visi

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang bertumbuh Kembang, Unggul, dan Terpercaya dengan bertumpu pada potensi Insan.

5. Misi

- a. Menjalankan bisnis lelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

- c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- d. Menjalankan Kegiatan usaha yang berwawasan Lingkungan.

Makna Logo

1. Bentuk Lambang

Bentuk, warna dan makna lambang perusahaan resmi yang digunakan adalah sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. : 031/DIR/76 tanggal: 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.

2. Elemen-elemen Dasar Lambang

a. Bidang Persegi Panjang Vertikal

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambing lainnya, melambangkan bahwa PT. PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya diperusahaan ini.

b. Petir atau Kilat

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung didalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat pada insan PT. PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya

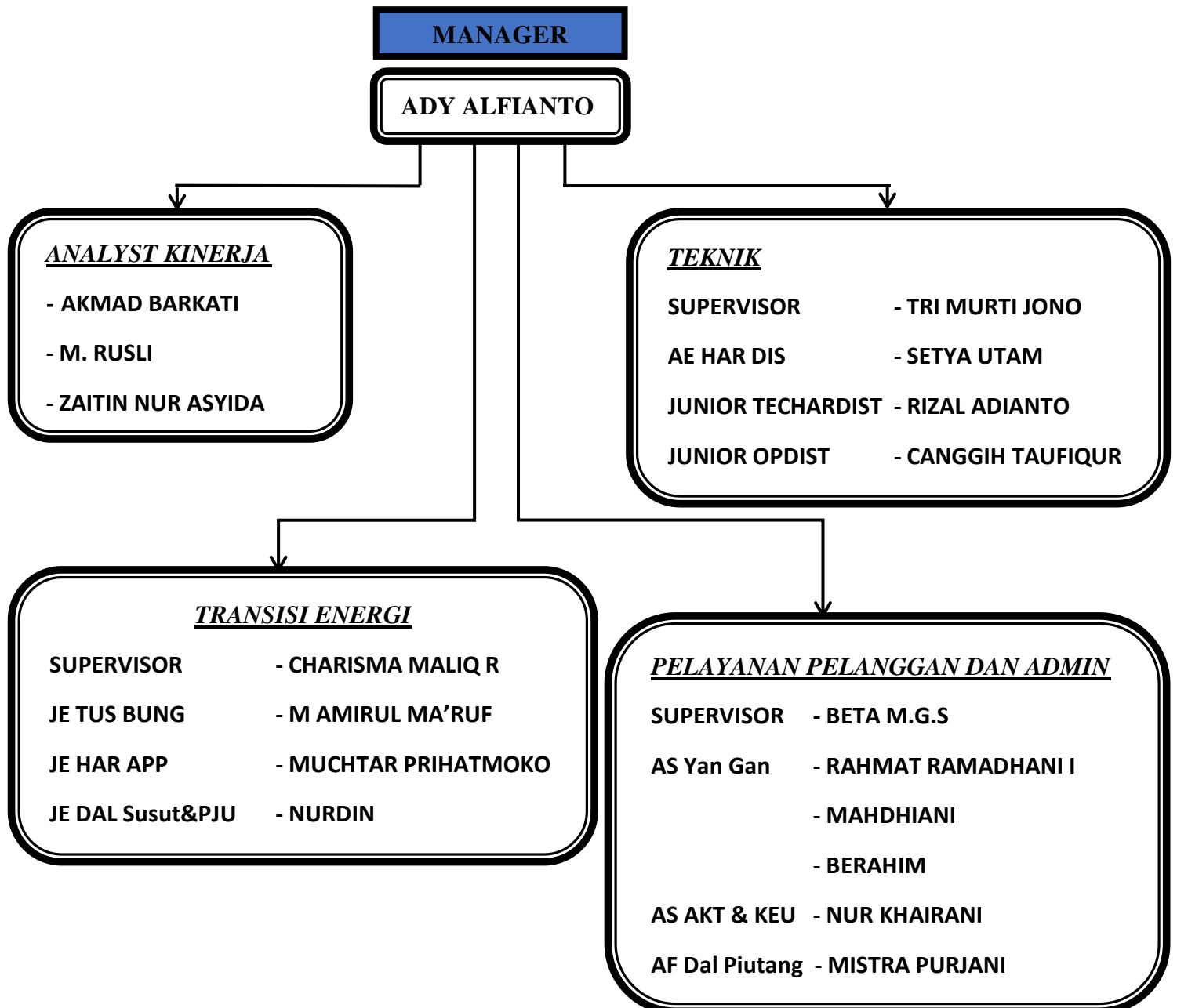
yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

c. Tiga Gelombang

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, pemyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT. PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan kontan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Disamping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

Gambar 4.1 Struktur organisasi dan personalia PT. PLN (Persero) Rayon

Ahmad Yani.tahun 2018



Sumber dibuat dari PT. PLN (Persero) Rayon Ahmad Yani

Uraian jabatan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

a. Manajer

Manajer rayon adalah yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik, niaga dan pelanggan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan pelayanan ketenagalistrikan secara efisien dan efektif dengan mutu dan keandalan untuk mencapai target kinerja unit.

Fungsi dan Tugas manajer

mengkoordinir pelaksanaan pedoman keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan (K3) untuk keselamatan dan keamanan pegawai dalam bekerja.

b. Supervisor Teknik

Supervisor Teknik adalah yang bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi, pemantauan susut distribusi dan upaya penurunannya, pengelolaan dan pengembangan aset jaringan dan kontribusi serta penyambungan dan pemutusan.

Fungsi dan Tugas

- 1) Meningkatkan keandalan sistem operasi jaringan distribusi
- 2) Memelihara jaringan distribusi
- 3) Mengendalikan pelayanan gangguan dan mengkoordinir petugas pelayanan teknik.
- 4) Memantau dan mengevaluasi susut distribusi dan upaya penurunannya.

- 5) Mengelola aset jaringan dan kontribusi distribusi
- 6) Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan penyambung dan pemutus
- 7) Memastikan penyusunan RAB dan SPK pekerjaan distribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Supervisor Transaksi Energi

1) Tugas

Mengkoordinasikan pengoperasian / pemeliharaan peralatan pengukuran, proteksi dan mengawasi pengoperasian / pemeliharaan AMR untuk meningkatkan keandalan penyaluran tenaga listrik yang efektif dan efisien kepada masyarakat pelanggan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan jadwal pemeliharaan proteksi dan pengukuran
- b) Mengawasi pelaksanaan pemeliharaan system proteksi dan pengukuran
- c) Mengkoordinir pengoperasian dan pemeliharaan perangkat AMR (Automatic Meter Reading)
- d) Mengawasi kegiatan pemeliharaan KWh meter dan pemeliharaan peralatan tera
- e) Menghitung arus gangguan dan merencanakan koordinasi setting relay proteksi
- f) Memonitor unjuk kerja system proteksi dan pengukuran
- g) Merencanakan pengembangan system proteksi dengan konfigurasi loop-scheme

- h) Membuat SOP pekerjaan pemasangan / pemeliharaan system proteksi dan pengukuran
- i) Mengawasi pelaksanaan pemasangan / pemeliharaan APP (Alat Pembatas Pengukuran) pelanggan > 66 KVA
- j) Mengevaluasi hasil pembacaan KWh terima dari G.induk, pembangkit yang terjadi energi terima diunit Cabang.

d. Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi

1) Tugas

- a) Mengelola informasi dan penyaluhan PB / PD / layanan lainnya yang berhubungan dengan sambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan, pelanggan dan masyarakat.
- b) Melaksanakan promosi penjualan tenaga listrik.
- c) Mengendalikan pelayanan PB/PD, penyambungan sementara, perubahan tarif, ganti nama pelanggan, balik nama pelanggan P2TL dan perubahan lainnya serta pegaduan pelanggan yang berhubungan dengan sambungan tenaga listrik.
- d) Mengendalikan, memonitor proses pelaksanaan perintah kerja (PK).
- e) Memeriksa kuintasi pembayaran yang berhubungan dengan pelaksanaan PB/PD, penyambungan sementara, perubahan lainnya.
- f) Bertanggung jawab atas penerimaan pembayaran Biaya Penyambungan (BP)/Uang Jaminan Langgan (UJL),

Penyambungan Sementara, Biaya perubahan, Tagihan Susulan dan Biaya Lainnya.

- g) Menjamin atas kebenaran perubahan Data Pelanggan dan hasil Peremajaan Data Induk Pelanggan (DIL)
- h) Mengelola Arsip Induk Pelanggan (AIL) dan UJL

2. Tarif Tenaga Listrik (TTL)

Tarif tenaga listrik (TTL) merupakan tarif yang boleh dikenakan oleh pemerintah kepada pelanggan PLN sebanyak 37 golongan tarif. 13 diantaranya mengikuti mekanisme *Tariff Adjustment* atau penyesuaian tarif.

Ada beberapa golongan tarif adalah Pelayanan Sosial, Rumah Tangga, Bisnis, Industri, Kantor Pemerintah & PJU, Traksi, Curah.

- a. Memahami jenis Golongan Tarif Sosial adalah pelanggan badan sosial yang tenaga listriknya digunakan untuk kegiatan sosial.

Khusus golongan tarif S-3 dibedakan kegiatan **Sosial Murni** dan **Kegiatan Komersial**. Perbedaan penggolongan antara Sosial Murni dan Sosial komersial:

1) Kegiatan Sosial Murni:

Kegiatan mrnyangkut kepentingan orang kebanyakan starata sosial bawah, contoh ;

- a) Rumah sakit milik instansi Pemerintah Pusat/Daerah
- b) Pusat Rehabilitas sosial (narkotika,penyakit kusta)
- c) Pusat Rehabilitas penderita cacat pemerintah

- d) Pusat Rehabilitas penderita cacat mental
- e) Asrama pelajar/mahasiswa milik pemerintah
- f) Asrama haji pemerintah
- g) Pusat pendidikan keagamaan: sekolah theologi/pondok pasantren
- h) Gedung kantor partai politik dan anfiliasi
- i) Museum milik pemerintah/pemerintah daerah
- j) Kebun binatang milik pemerintah/pemerintah daerah

2) Kegiatan Sosial Komersial:

Menyangkut pelayanan untuk strata sosial menengah ke atas, terutama yang lebih berorientasi kearah pengembangan (self propelling growth)

contoh:

- a) Sekolah/ perguruan tinggi swasta
- b) Rumah sakit swasta
- c) Poliklinik/pratek dokter bersama
- d) Lembaga riset swasta
- e) Yayasan pengelola haji non-pemerintah (ONH-plus)
- f) Pusat pendidikan dan latihan perusahaan swasta (misalnya: Pusklat Garuda, Pusklat Bank Mandiri, Pusklat Unilever, Lembaga pendidikan Indonesia-Amerika,dll)

3) Penjelasan pelanggan tarif Rumah Tangga adalah pelanggan perseorangan atau badan soial yang tenaga listriknya digunakan

untuk keperluan rumah tangga. Contoh yang termasuk didalam golongan rumah tangga diantaranya:

- a) Rumah untuk tempat tinggal
 - b) Kelompok rumah kontrakan
 - c) Rumah susun milik perorangan
 - d) Rumah susun milik perumnas
 - e) Asrama keluarga pegawai perusahaan swasta
 - f) Asrama mahasiswa
- 4) Penjelasan yang mana pelanggan yang termasuk dalam golongan bisnis adalah pelanggan yang sebagian atau seluruh tenaga listrik dari PT PLN (Persero) digunakan untuk salah satu atau beberapa kegiatan berbentuk:
- a) Usaha jual beli barang, jasa, dan perhotelan
 - b) Usaha perbankan
 - c) Usaha perdagangan ekspor/impor
 - d) Kantor Firma, CV, PT atau badan hukum/perorangan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan.
 - e) Usaha pergudangan dimana sebagian atau seluruh bangunan digunakan untuk tempat penyimpanan barang atau material
 - f) Usaha perorangan atau badan hukum yang sebagian besar atau seluruh kegiatannya merupakan penjualan barang atau jasa.
 - g) Usaha-usaha lainnya yang bertendensi komersial seperti praktek dokter, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan aturan Tarif Tenaga Listrik sebelumnya, usaha dengan kegiatan pengolahan yang memberikan nilai tambah atas sesuatu produk, dapat dikeluarkan dari kelompok tarif bisnis dan dimasukkan dalam kelompok industri.

5) Industri ialah pada perusahaan-perusahaan atau pabrik yang bekerja mengindustri barang.

6) Kantor Pemerintah dan PJU (Penerangan Jalan Umum)

7) Traksi, ialah pelanggan yang dapat dikelompokkan dalam golongan tarif T (traksi) adalah perusahaan bergerak dibidang transformasi umum yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia, dengan ketentuan saebagai berikut:

a) Tenaga listrik dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung sebagai penggerak utama sarana pengangkutan yang dioperasikan.

b) Instalasi untuk operasi transportasi dipisahkan dari instalasi penunjang seperti bangunan gedung stasiun, bengkel pemeliharaan, gudang perlengkapan dan lain sebagainya.

8) Curah, ialah pelanggan yang dapat dikelompokkan dalam golongan tarif C adalah badan usaha Koperasi Unit Desa (KUD) yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Bergerak dibidang khusus tenaga listrik

b) Mengoperasikan sendiri jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah yang memenuhi standar PLN setempat

- c) Bersedia disamakan dengan pelanggan tidak menentukan hak eksklusif tertentu.

B. Analisi Data

Data lapangan diperoleh melalui wawancara kepada supervisor pelanggan dan admin, yaitu bapak Beta M.G.S mengenai pelanggan PT. PLN (Persero) Rayon Ahmad Yani.

1. Analisis Piutang Dagang PT. PLN (Persero) Rayon Ahmad Yani

Berikut laporan keuangan tentang pendapatan dan piutang dagang PT.

PLN (Persero) Rayon Ahmad Yani:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Pendapatan, Piutang dan Piutang tak tertagih PT.

PLN (Persero) Rayon Ahmad Yani tahun 2016 sampai 2020

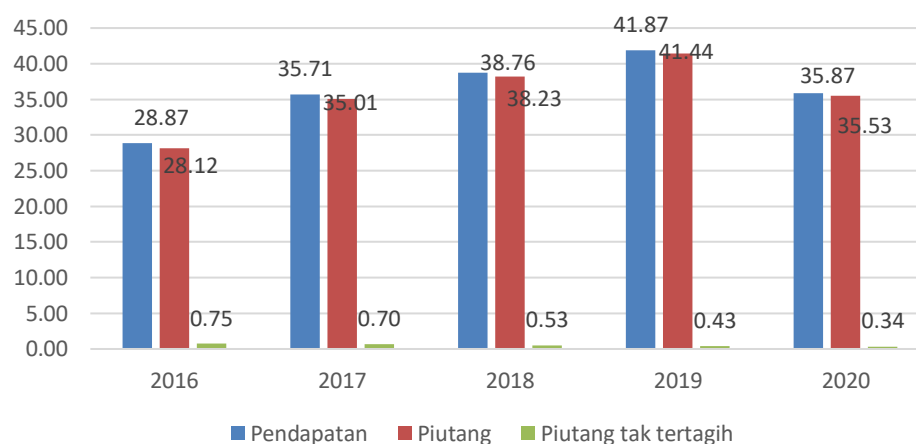
	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan	28.873.456.789	35.712.346.789	38.762.384.567	41.874.567.345	35.874.568.432
Piutang	28.119.889.246	35.014.908.496	38.228.038.899	41.442.221.978	35.532.222.758
Piutang tak tertagih	753.567.543	697.438.293	534.345.668	432.345.367	342.345.674

Sumber data diolah dari PT.PLN (Persero) Rayon Ahmad Yani

Grafik 4.1 Rekapitulasi Pendapatan, Piutang dan Piutang tak tertagih PT.

PLN (Persero) Rayon Ahmad Yani tahun 2016 sampai 2020

Rekapitulasi Pendapatan, Piutang dan Piutang tak Tertagih (Rp. Miliar)



Sumber data diolah dari PT.PLN (Persero) Rayon Ahmad Yani.

Piutang adalah sebuah tagihan kepada pelanggan akibat dari adanya penjualan barang atau jasa secara kredit, dalam hal ini tagihan tersebut tidak dilengkapi dengan surat perjanjian formal melainkan hanya unsur kepercayaan dan kebijakan perusahaan dengan menentukan syarat-syarat penjualan yang mana diartikan secara luas sebagai tagihan atas segala sesuatu hak perusahaan baik berupa uang, barang dan jasa atas pihak ketiga. (Baridwan, 2015, hal. 124)

Pendapatan dalam akuntansi keuangan adalah meningkatnya jumlah aktiva atau menurunnya kewajiban suatu kegiatan organisasi sebagaimana akibat dari penjualan barang dan jasa kepada pihak lain dalam periode tertentu. Pengertian pendapatan dalam sebuah perusahaan yang bergerak pada dagang diperolehnya pendapatan dari penjualan barang dagangnya. (Fuad, 2006, hal. 168)

Secara umum pendapatan merupakan kenaikan aktiva atau pengurangan kewajiban yang bersumber dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan komersial perusahaan. Setelah direalisasikan menjadi kas, piutang yang berasal dari pendapatan berubah menjadi kas. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem jurnal khusus sering mencatat semua hasil penjualan tunai dengan debit piutang dan kredit penjualan. Pada saat yang bersamaan juga mengkredit piutang dan mendebet kas. Hal ini dimungkinkan karena penjualan, piutang dan kas merupakan akun yang saling berhubungan dalam urutan transaksi pendapatan dan penerimaan kas. (L.M.Samryn, 2015, hal. 57)

Pada hasil lapangan di PT. PLN (Persero) Rayon Ahmad Yani mengakui pendapatan pada tahun 2017 adalah Rp. 35.712.346.789, pada tahun 2018 adalah Rp. 38.762.384.567, pada tahun 2019 adalah Rp. 41.874.567.345, pada tahun 2020 adalah Rp. 35.874.568.432,-. Dapat dilihat bahwa pendapatan tertinggi pada tahun 2019 sedangkan pendapatan terendah pada tahun 2017.

Piutang perseroan pada tahun 2017 adalah Rp. 35.014.908.496, pada tahun 2018 adalah Rp. 38.228.038.899, pada tahun 2019 adalah Rp. 41.442.221.978, dan pada tahun 2020 adalah Rp. 35.532.22.758,- sehingga dapat disimpulkan bahwa piutang terbesar pada tahun 2019 dan terkecil pada tahun 2017.

Piutang tak tertagih perseroan pada tahun 2017 adalah Rp. 697.438.293, pada tahun 2018 adalah Rp. 534.345.668, pada tahun 2019

adalah Rp. 432.345.367, dan pada tahun 2020 adalah Rp. 342.345.674,- oleh karena itu dapat diperhatikan bahwa piutang tak tertagih terbesar pada tahun 2017 dan terkecil pada tahun 2020.

Perputaran piutang (*Receivable Turnover*) piutang sebagai modal kerja sebaiknya harus selalu dalam keadaan berputar, yaitu dari kas, berubah menjadi komoditi, penjualan, kemudian menjadi piutang, dan kembali menjadi kas. Semakin cepat perputarannya semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Perputaran piutang dapat dihitung dengan cara membagi jumlah bersih dengan rata-rata piutang. Sedangkan untuk menghitung lama hari pengumpulan piutang dengan membagi jumlah hari dalam satu tahun atau 360 dibagi dengan jumlah rata-rata piutang, dengan kata lain dapat ditulis dengan rumus:

$$\text{perputaran piutang} = \frac{\text{penjualan bersih}}{\text{rata - rata piutang}} = \dots \text{kali}$$

$$\text{rata - rata piutang} = \frac{360}{\text{perputaran piutang}} = \dots \text{hari}$$

(zainab, Penganggaran Perusahaan, 2022, hal. 111)

Hasil hitungan perputran piutang atau *Receivable Turnover* (RTO)

$$\text{Hasil perputaran piutang (RTO)} = \frac{\text{Penjualan bersih}}{\text{Rata - rata piutang}}$$

$$\text{Hasil RTO (2017)} = \frac{35,712\ 346\ 789}{31,567\ 398\ 871} = 1,13\text{kali}$$

$$\text{Hasil RTO (2018)} = \frac{38,762\ 384\ 567}{36,621\ 473\ 697\ 5} = 1,06\text{kali}$$

$$\text{Hasil RTO (2019)} = \frac{41,874\ 567\ 345}{39,835\ 130\ 438\ 5} = 1,05\text{kali}$$

$$\text{Hasil RTO (2020)} = \frac{35,874\ 568\ 432}{38,487\ 222\ 368} = 0,93\text{kali}$$

Hasil Rata- Rata Piutang atau *Average Coleection Periode (ACP)*

$$\text{Hasil Rata – Rata Piutang (ACP)} = \frac{360}{\text{RTO}}$$

$$\text{Hasil ACP (2017)} = \frac{360}{1,13} = 318\text{hari}$$

$$\text{Hasil ACP (2018)} = \frac{360}{1,06} = 340\text{hari}$$

$$\text{Hasil ACP (2019)} = \frac{360}{1,05} = 342\text{hari}$$

$$\text{Hasil ACP (2020)} = \frac{360}{0,93} = 386\text{hari}$$

Piutang yang telah ditetapkan sebagai piutang tak tertagih bukan merupakan aktiva lagi, oleh karena itu harus dikeluarkan dari pos piutang dalam neraca. Piutang tak tertagih atau *Bad debt*, merupakan suatu kerugian, dan kerugian ini harus dicatat sebagai beban (Expense), yaitu beban piutang tak tertagih (*bed debtexpense*), yang disajikan dalam laporan laba rugi. Semua penghapusan ini harus dicatat dengan tepat dan teliti karena berhubungan langsung dengan laporan keuangan yang digunakan

manajemen dalam pengambilan keputusan. (fitriana, 2022, hal. 53). Tidak hanya itu piutang tak tertagih juga dapat menunjukkan berapa besar penagihan piutang yang akan dibayar oleh pelanggan. Berikut rumus tentang penagihan

$$\text{Penagihan} = \frac{\text{Jumlah Piutang Tak Tertagih}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Hasil dari penagihan

$\text{Penagihan} = \frac{\text{Jumlah Piutang Tak Tertagih}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$
$\text{Penagihan (2017)} = \frac{697,438,293}{35,014,908,496} \times 100\% = 19,918\ 324\ 402\ 13$
$\text{Penagihan (2018)} = \frac{534,345,668}{38,228,038,899} \times 100\% = 13,977\ 846\ 716\ 4$
$\text{Penagihan (2019)} = \frac{432,345,367}{41,442,221,978} \times 100\% = 10,432\ 485\ 189\ 4$
$\text{Penagihan (2020)} = \frac{342,345,674}{35,532,222,758} \times 100\% = 9,634\ 796\ 770\ 13$

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Rasio yang Berhubungan dengan Piutang

	2017	2018	2019	2020
RTO (kali)	1,13 kali	1,06 kali	1,05 kali	0,93 kali
ACP (hari)	318 hari	340 hari	342 hari	386 hari
Rasio Penagihan	19,9 %	13,97 %	10,43 %	9,63 %

Sumber data diolah dari PT. PLN(Persero) Rayon Ahmad Yani

Dari tabel 4.1, Pendapatan PT. PLN (Persero) Rayon Ahmad Yani dari 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2020

mengalami penurunan sebesar -14,33% jika dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2021 (*year on year/yoy*) hal ini disebabkan oleh penurunan disebabkan oleh pandemi covid.19 yang mana mulai pada awal tahun 2020 sedangkan Perkembangan piutang dagang pada PT. PLN (Persero) Rayon Ahmad Yani sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -14, 26% jika dibandingkan dengan piutang pada tahun 2021 (*year on year/yoy*). Penurunan disebabkan oleh pandemi covid.19 yang mana mulai pada awal tahun 2020. Piutang Tak Tertagih yang dimiliki PT. PLN (Persero) Rayon Ahmad Yani dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan pada tahun 2020, piutang tak tertagih 2020 sebesar 342,345 674 atau -0,21% jika dibandingkan dengan piutang tak tertagih pada tahun 2021 (*year on year/yoy*). Adanya penurunan piutang tak tertagi setiap tahunnya menunjukkan kinerja PT. PLN (Persero) Rayon Ahmad Yani semakin baik karena bisa mengontrol resiko piutang yang tak tertagih.

Pada tabel 4.2 hasil perputaran piutang berdasarkan RTO di PT.PLN (Persero) Rayon Ahmad Yani dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang optimal dalam menjalankan perputaran piutangnya, padahal semakin sering perputaran piutang berarti semakin aktifnya perusahaan dalam menjalankan oprasionalnya. Perputaran piutang (*receivable turnover*), rasio ini mengukur berapa kali rata-rata piutang dapat tertagih selama satu periode. (J.Weygendt, 2008, hal. 399) sedangkan hasil perputaran piutang

berdasarkan ACP semakin tahun semakin banyak hari yang dibutuhkan untuk melakukan perputaran piutang contohnya pada tahun 2017 ACP sebanyak 318 hari artinya jangka waktu penagihan tersebut kurang dari satu tahun sedangkan pada tahun 2020 ACP 386 hari jangka waktu penagihan lebih lama dari tahun 2017. Jika dilihat dari rasio penagihan berdasarkan piutang tak tertagih maka selama ini mengalami penurunan yang dikarenakan PT. PLN(Persero) Rayon Ahmad Yani selalu melakukan pengontrolan terhadap pelanggan yang mempunyai piutang terhadap perusahaan dan mulai di sosialisikannya penggunaan listrik dengan metode Prabayar (Token). Terbukti dari 2017 dengan persentase penagihan sebesar 19,9% menjadi 9,63% ditahun 2020.

Dengan menggunakan ACP , kita akan langsung mendapatkan jangka waktu penagihan piutang usaha dalam hari atau bulannya. Semakin rendah angka ACP makin cepat piutang usaha tertagih. Dengan hal itu berdampak baik dalam jangka pendek, maka akan berdampak buruk dalam jangka panjang dikarenakan dimana pelanggan merasa jangka waktu pembayaran mereka terlalu cepat.

2. Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Dagang yang selama ini Dijalankan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Ahmad Yani

Mekanisme laporan pencatatan keuangan di PT. PLN(Persero) Rayon Ahmad Yani dilakukan dengan proses terpusat mulai dari tahun 2014, dengan itu segala transaksi utama perusahaan yang terkait dengan penjualan tenaga listrik akan dicatat oleh kantor pusat PT. PLN yang berada di Jakarta.

Sedangkan kantor wilayah ditiap-tiap daerah di Indonesia, termasuk kantor PLN (Persero) Rayon Ahmad Yani hanya melakukan transaksi kas kecil dan transaksi-transaksi lainnya diluar dari penjualan tenaga listrik dimana kantor wilayah hanya memantau penyaluran tenaga listrik dan jumlah daya yang digunakan setiap priodenya. Di PT. PLN(Persero) Rayon Ahmad Yani akuntansinya dilakukan secara sistematis menggunakan aplikasi komputer yaitu salah satu program yang digunakan adalah *systems, applications and products* (SAP) dan Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T). Adanya permintaan penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan yang ditandai dengan keluarnya rekening tagihan pelanggan, hingga adanya kas masuk dengan semua transaksi yang ada akan dilakukan pencatatan dan di proses kemudian akan secara otomatis disalurkan ke rekening pusat PLN Jakarta.

PT. PLN(Persero) Rayon Ahmad Yani diberi uang kas sekitar kurang lebih 10 juta dalam satu minggu hampir 40 juta satu bulannya yang mana untuk keperluan oprasionalnya kantor seperi membeli keperluan pearalatan, perlengkapan dan ATK kantor perlukan, dan kegiatan rutinitas kantor lainnya seperti senam dan sebagainya, keperluan oprasional lapangan seperti membeli bahan bakar mobil yang mana mobil tersebut bertugas kelapangan atas pengaduan permintaan pasang baru rekening listrik, pergantian rekening listrik dari pasca bayar ke prabayar (token), pengeluaran ketergangguan misalnya pohon tumbang yang terkena tiang listrik ataupun tiang PJU (Penerangan Jalan Umum) dan hingga kerusakan pada alat

rekening listrik. Yang mana kegiatan kantor tersebut atas dana yg diberikan dilaporkan oleh pihak PLN(Persero) Rayon Ahmad Yani kepada bagian UP3 Banjarmasin dikantor Lambung Mangkurat dengan pencatatan beserta bukti-bukti transaksi, laporan tersebut hanya berupa excel, dilaporkannya seminggu sekali tepatnya setiap hari kamis.

Aplikasi lainnya yang digunakan oleh PT PLN, yaitu aplikasi PLN Mobile yang mana digunakan oleh pihak PT.PLN untuk mempermudah pelanggan dalam keluhan pelanggan dengan itu aplikasi ini memiliki fitur terbaik di PLN Mobile dengan memiliki 4 menu ekosistem diantaranya satu kelistrikan ialah pemasangan baru, ubah daya, hingga penyambungan sementara yaitu jika kita mengadakan acara besar dirumah sehingga memerlukan listrik yang cukup banyak, kedua internet, ketiga perbaikan ialah kebutuhan instalasi listrik dirumah, dikantor, atau gedung ketika mengalami gangguan, dan yang terakhir adalah SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum untuk mengetahui lokasi terdekat untuk pengisian kendraan listrik.

PT. PLN(Persero) menjual produk ketenaga listrikan, ada dua jenis yaitu Pascabayar (*postpaid*) dan Prabayar (*prepaid*). Pascabayar (*postpaid*) adalah penggunaan listrik terlebih dahulu selama satu bulan kedepan setelah itu baru kita membayar jasa kelistrikan, atas tagihan yang telahh kita gunakan satu bulan tersebut, dan Prabayar (*postpaid*) atau juga sering disebut dengan token adalah pelanggan perlu bayar atau beli terdahulu pulsa listrik atau token sesuai kebutuhan pelanggan yang mana baru bisa kita

gunakan dan nikmati hingga habis pulsa listrik atau tokennya maka habis juga stroomnya. Dari kedua jenis produk tersebut yang dapat memunculkan potensi tagihan listrik terhadap pelanggan atau juga bisa disebut dengan piutang dagang adalah pascabayar. Jenis Piutang terbagi menjadi piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lainnya. Umur Piutang yang berarti adanya pengelompokan piutang usaha kedalam kategori yang berdasarkan tanggal jatuh temponya piutang.

Tabel 4.3 Persentase kelompok umur piutang

No	Kelompok Umur	Persentase
1	Belum Jatuh Tempo	2%
2	Telah Jatuh Tempo 1-30 Hari	5%
3	Telah Jatuh Tempo 31-60 Hari	10%
4	Telah Jatuh Tempo 61-90 Hari	20%
5	Telah Jatuh Tempo 91-180 Hari	30%
6	Telah Jatuh Tempo 181-365 Hari	50%
7	Telah Jatuh Tempo diatas 365 hari	50%

Sumber dari (Hery, Pengendalian Akuntansi dan Manajemen, 2014, hal. 80)

Cadangan Kerugian Piutang, ialah resiko tidak dibayarnya seluruh tagihan (piutang) yang disebabkan oleh jumlah piutang yang tidak dapat direalisasikan karena beberapa faktor seperti seleksi yang kurang baik dalam memilih pelanggan, resiko tidak dibayarkan sebagian piutang resiko ini menyebabkannya berkurang pendapatan perusahaan dan juga bisa menimbulkan kerugian ketika jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit, resiko keterlambatan

pelunasan piutang disebabkan karena adanya biaya lain yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya penagihan kepada pihak debitur, resiko tidak tertanamnya modal dalam piutang.

Pengakuan piutang dagang dapat diakui atau dicatat ketika perusahaan mendapatkan piutang usaha, dengan adanya melakukan transaksi penjualan kredit. Dimana di PLN melakukan penjualan listrik jenis produk pasca bayar yang mana artinya pemakaian terlebih dahulu selama satu bulan kedepan baru melakukan pembayaran atas piutang pemakaian listrik tersebut. PT. PLN akan mengakui langsung piutang atas penjualan tenaga listrik tersebut. Ada beberapa keadaan untuk mengakui piutang usaha PT. PLN ialah sebagai berikut:

- a. Tagihan tenaga listrik (invoices) yang diterbitkan bagi pelanggan pascabayar
- b. Terbitnya Surat Pengakuan Hutang (SPH) untuk transaksi pasang baru atau rubah daya atas Biaya Pemasangan (BP) dan Uang Jaminan Langgan (UJL)
- c. Penetapan tagihan susulan akibat P2TL (Penerbit Pemakaian Tenaga Listrik)
- d. Biaya keterlambatan (atas penjualan tenaga listrik)

Pengecualian bagi poin b,c, dan d yang merupakan unsur piutang lain-lain, namun dalam pelaksanaannya untuk tujuan kepraktisan PT. PLN memasukkan piutang tersebut ke dalam pengakuan piutang usaha.

Unsur piutang dagang lainnya yang diakui adalah pajak penerangan jalan yang mana penetapannya sesuai dengan kewenangan daerah setempat pada penelitian ini penerapan pajak penerangan jalan sebesar 5% dari pemakaian tenaga listrik (PTL) netto .

Pengecekan meter listrik yang dilakukan oleh petugas lapangan satu bulan sekali dimana mereka akan melakukan pencatatan dan akan disesuaikan dengan sistem yang dimiliki oleh PLN, dari hasil pengecekan tersebut setelah diverifikasi akan diproses menjadi data pemakaian kWh (*Kilo Watt per Hours*). Pencatatan pemakaian listrik akan dihitung sejak pertama kali digunakan pada awal bulan hingga akhir bulan. Pencatatan pemakaian listrik ini disebut dengan tagihan perusahaan yang akan ditagih pada awal hingga pertengahan bulan berikutnya. Sistem pencatatan tagihan listrik menggunakan metode akrual basis yang artinya proses piutang terjadi dan dihitung sejak awal pemakaian tenaga listrik, tetapi penagihannya tidak langsung ditagih kepada pelanggan dan dikumpulkan terlebih dahulu selama satu bulan. Contoh dari pencatatan piutang tagihan listrik dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Bapa sungeng yang beralamat di simpang gatot subroto VI jalan ketumbar dengan tarif daya R1/1300 VA untuk tarif listrik pasca bayar per Agustus 2019 tercatat di PLN sebagai berikut:

Pemakaian kWh total (24 juni hingga 25 juli 2019) sebanyak 115 kWh, dengan biaya pemakaian per kWh Rp.1.467,28.

Biaya beban 115. kWh X Rp.1.467,28. Rp 168.737,200

PPN Rp. 16.874	Rp	0
(PPN dibebaskan sesuai PP NO.81 Tahun 2015)		
Pajak Penerangan Jalan (Pemda)	Rp	8.437
(5% dikali PTL Netto)		
Total Tagihan kepada pelanggan	Rp	117.174,200

Kemudian akan dijurnal sebagai berikut:

Tabel 4.4 Akun Jurnal pengakuan Penjualan Tenaga Listrik Pasca Bayar

Kode Akun	Keterangan	Debit	Kredit
	Piutang Pelanggan. PPN Rekening Listrik yang sudah disetor. Utang PPJU. Pendapatan Penjualan Tenaga Listrik.	Rp.117.174,200	0 Rp.8.437 Rp.168.737,200

Tuan sungeng merupakan pelanggan dengan kode R1/TR yaitu golongan pelanggan rumah tangga (TR= Tegangan Rendah) dengan batas daya 1,300VA. Pada tanggal 1 September 2019 proses billing yang dilakukan oleh AP2T PT. PLN memperlihatkan total tagihan rekening listrik bulan Agustus sebesar RP. 117.174,200. PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum) merupakan pajak yang ditetapkan tiap daerah, sebagai contoh yaitu banjarmasin 5% kepada pelanggan untuk penerangan jalan. PPJ adalah pajak yang wajib dibayar oleh pelanggan listrik PLN. Dimana hasil PPJU tersebut merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai daerah, termasuk pemasangan dan

pemeliharaan serta pembayaran rekening PJU sesuai kemampuan PEMDA.

Apabila PLN melakukan setoran pembayaran PJU kepada PEMDA, maka PLN Menjurnal sebagai berikut:

Tabel 4.5 Akun Jurnal Pembayaran PJU kepada PEMDA

Kode Akun	Keterangan	Debit	Kredit
	Utang PJU	Rp. 8.437	
	Bank/Kas		Rp. 8.437

PT. PLN mengikuti Standar Akuntansi Keuangan dalam pencatatan piutang pelanggannya. Piutang yang termasuk dalam kategori aset keuangan yang diatur di PSAK 71 dan termasuk ke dalam klasifikasi “pinjaman yang diberikan dan Piutang”

Apabila Tuan Sugeng tidak dapat membayar hutangnya, misalnya piutang tersebut tidak mampu dibayar dalam jangka waktu tiga bulan kepada PT. PLN, maka PT. PLN secara otomatis akan mencatat pengakuan piutang ragu-ragu dalam jurnal sebagai berikut:

Tabel 4.6 Akun Jurnal Peniadaan Piutang Pihak Ketiga

Kode Akun	Keterangan	Debit	Kredit
	PPN Rek. Listrik yg dibyr	0	
	Utang PJU	0	
	Pend. Penj. Tenaga listrik	Rp. 8.437	
	Piutang Pelanggan	Rp.168.737,200	

			Rp. 177.174,200
--	--	--	-----------------

Kemudian PT. PLN akan memindahkan piutang pelanggan (langganan) ke piutang ragu-ragu dalam jurnal sebagai berikut:

$$20\% \times \text{Saldo akhir piutang usaha} = 20\% \times \text{Rp. 177.174,200} = \text{Rp. 35.434,840}$$

Tabel 4.7 Akun Jurnal Pengakuan Piutang Ragu-Ragu

Kode Akun	Keterangan	Debit	Kredit
	Piutang Ragu-Ragu	Rp. 35.434,840	
	Piutang Pelanggan		Rp. 35.434,840

Pencatatan untuk pengakuan kembali piutang yang telah dihapuskan apabila Tuan Sugeng dikemudian hari membayarkan hutangnya tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Akun Jurnal Penghapusan Piutang Ragu-Ragu

Kode Akun	Keterangan	Debit	Kredit
	Cadangan penurunan nilai piutang usaha	Rp. 35.434,840	
	Piutang Ragu-Ragu		Rp.35.434,840

Sedangkan untuk pengakuan penerimaan kembali piutang yang telah di hapus, PT. PLN akan menjurnal sebagai berikut:

Tabel 4.9 Akun Jurnal Pengakuan Kembali Piutang yang telah
Dihapuskan

Kode Akun	Keterangan	Debit	Kredit
	Bank	Rp.168.737,200	
	Utang PPJ	Rp.8.437	
	Pend. Diluar operasi		Rp.177.174,200
	PPN Rek. Listrik yang dibayar		Rp.0

Perusahaan haru menjelaskan dasar penetapan penyisihan piutang tak tertagih, yaitu berdasarkan penelaahan terhadap saldo masing-masing piutang usaha pada akhir periode. PT. PLN menyusun laporan keuangan dengan mengemukakan:

- a. Jumlah piutang yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasaki
- b. Jumlah piutang menurut mata uang
- c. Alasan dan dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai
- d. Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, beban cadangan kerugian
- e. Penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang
- f. Pendapat manajemen akan kecukupan jumlah cadangan atau keyakinan manajemen atas ketertagihan piutang apabila tidak dibentuk cadangan

- g. Jumlah diamortisasikan dengan menggunakan metode suku bunga efektif
- h. Informasi keterlibatan berkelanjutan atas piutang yang ditransfer, meliputi; satu, jumlah yang ditransfer, beban bunga, retensi, jatuh tempo, dan ikatan penting lain yang diatur dalam perjanjian, dan kedua jaminan yang diberikan (bila ada)
- i. Rekonsiliasi perubahan akun cadangan penurunan nilai selama periode penyajian.

Berdasarkan PSAK 71, PT. PLN menyajikan piutang usaha dilaporkan posisi keuangan sebagai bagian dari aset lancar. Cadangan penurunan nilai piutang disajikan di laporan posisi keuangan sebagai bagian kontra akun (pengurangan) dari piutang usaha dalam aset lancar. Jumlah kerugian penurunan nilai disajikan dalam laporan laba rugi. Berikut contoh penyajian piutang usaha dalam laporan keuangan PT PLN (Persero) sebagai berikut:

Gambar 4.2 Penyajian Laporan Keuangan

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES				
Lampiran 1/1 Schedule				
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION AS AT DECEMBER 31, 2020 AND 2019 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)	
	Catatan/ Notes	2020	2019*)	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	13	54,735,434	46,598,783	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	14	366,708	334,153	Short-term investments
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak berelasi	15	731,817	819,836	Related parties
Pihak ketiga	15	20,546,599	24,310,702	Third parties
Piutang dari Pemerintah	16	819,067	45,426,981	Receivables from Government
Piutang lain-lain	17	1,746,344	2,024,103	Other receivables
Persediaan	18	10,277,289	12,934,233	Inventories
Paik dihavar di muka	19	7.287.693	17.634.137	Prepaid taxes

15. PIUTANG USAHA

15. TRADE RECEIVABLES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
Badan Usaha Milik Negara	751,918	823,893	<i>State-Owned Enterprises</i>
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	<u>(20,101)</u>	<u>(4,057)</u>	<i>Allowance for expected credit loss</i>
Subjumlah	<u>731,817</u>	<u>819,836</u>	<i>Subtotal</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Umum	21,631,126	24,076,371	<i>Public</i>
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI dan POLRI)	960,996	807,915	<i>Tentara Nasional Indonesia and Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI and POLRI)</i>
Lainnya	<u>1,139,388</u>	<u>1,379,073</u>	<i>Others</i>
Subjumlah	23,731,510	26,263,359	<i>Subtotal</i>
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	<u>(3,184,911)</u>	<u>(1,952,657)</u>	<i>Allowance for expected credit losses</i>
Subjumlah	<u>20,546,599</u>	<u>24,310,702</u>	<i>Subtotal</i>
Jumlah, bersih	<u>21,278,416</u>	<u>25,130,538</u>	<i>Total, net</i>

Sumber dari Laporan Keuangan PLN(Persero) Tahun 2020